



Bendesa dan Istrinya Diperiksa 3 Jam

■ Kasus Dugaan Penyelewengan Dana BKK Desa Candikuning

TABANAN, TRIBUN BALI - Bendesa Adat Desa Pakraman Candikuning, I Made Susila Putra diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, Senin (15/5). Ia diperiksa ihwal kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Khusus Kabupaten (BKK) tahun 2015 lalu. Tidak hanya Susila, istrinya, Ni Made Rinawati juga turut diperiksa.

Kasi Pidana Khusus (Pid-sus) Kejari Tabanan, Ida Bagus Alit Ambara Pidada mengatakan, kedua saksi dimintai keterangan selama tiga jam mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita.

Pemanggilan Rinawati untuk konfirmasi biaya pembelian konsumsi *pasraman* kilat anak-anak yang masuk dalam laporan pertanggungjawaban BKK Desa Pakraman Candikuning 2015.

"Dikatakan saksi tidak ada pembelian nasi untuk konsumsi *pasraman* kilat," ujar Ida Bagus Alit Ambara, Senin (15/5).

Tahun 2014 Desa Candikuning mengajukan proposal

BKK ke Provinsi Bali. Dana cair setahun berselang dan digunakan untuk upacara *ngenteg linggih* dan *pasraman* kilat anak-anak.

Dalam laporan pertanggungjawaban proposal, ditulis Rp 156 juta untuk biaya *ngenteg linggih*, Rp 20 juta untuk *pasraman* kilat, Rp 21 juta untuk biaya operasional *prajuru* desa Pakraman Candikuning, dan biaya penunjang administrasi Rp 3 juta.

"Tapi bendahara upacara ritual *ngenteg linggih* tidak pernah mencatat ada dana BKK yang masuk," kata Ida Bagus

Alit.

"Sempat disebutkan dananya itu ditalangi oleh bendesa adat. Tapi, pelaksanaan upacara *ngenteg linggih* sumber dananya dari urunan warga dan dana *pengempon* Pura Ulun Danu Beratan yang total jumlahnya mencapai Rp 1,5 miliar. Untuk kegiatan *pasraman* merupakan agenda rutin sekolah," paparnya

Kata dia, minimal harus ada dua alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. "Kami masih pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi," ujarnya. (arg)

Tak Sesuai Realisasi

SEBELUMNYA Kejari Tabanan sudah meminta keterangan terhadap Perbekel Desa Candikuning, 10 warga, dan seorang staf dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sekitar Maret 2017. Kejari Tabanan menemukan adanya pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi dalam kasus ini.

"Beberapa pihak telah kami mintai keterangan, sudah dari perbekel, bendesa pakraman dan 10 warga desa, juga telah minta data dari Dinas Kebudayaan Provinsi," jelas Ida Bagus Alit.

Bendesa Pakraman Desa Candikuning I Made Susila Putra juga sempat menjelaskan bahwa proses penggunaan dana BKK di desanya tidak ada masalah. Kata dia, peruntukan dana sudah sesuai, baik dari penyaluran hingga penggunaannya. (arg)

Edisi : Selasa, 16 Mei 2017

Hal : 4